



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

e-klipping

Kumpulan Berita Harian Media Online

SUBJEK

POLITIK

Rabu, 20 September 2023

BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN
Perpustakaan
2023

Daftar Isi

1. PEMILU DARI SABANG SAMPAI MERAUKE – *Media Online Kompas*
2. TARGET MELESET, SDGs BISA MOLOR 42 TAHUN – *Media Online Kompas*
3. RI STRESSES GLOBAL SOUTH ECONOMIC RIGHTS, TRADE – *Media Online The Jakarta Post*

KOMPAS

Rabu

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

20 September 2023

Pemilu dari Sabang sampai Merauke

KPU memperkenalkan 18 bendera parpol peserta Pemilu 2024 ke khalayak ramai di berbagai pelosok Tanah Air. Tak hanya menyosialisasikan pemilu, kirab itu juga digelar untuk mengedukasi pemilih dari Sabang sampai Merauke.

Rute Kirab Pemilu 2024

Jalur I Start: Banda Aceh
Jalur II Start: Batam
Jalur III Start: Pontianak
Jalur IV Start: Tanjung Selor
Jalur V Start: Kab Pulau Morotai
Jalur VI Start: Kupang
Jalur VII Start: Jayapura

Rangkaian Kendaraan Kirab Pemilu 2024

- Mobil Jagat Saksama
- Bendera Partai Politik peserta Pemilu 2024
- Bendera Merah Putih
- Mobil Pembawa Bendera
- Mobil KPU
- Mobil Patwal

Partisipasi Pemilih di Pemilu (Juta)

| Tahun | Pemilih | Presiden | DP |
|-------|---------|----------|-----|
| 2009 | 176 | 127 | 121 |
| 2014 | 183 | 139 | 134 |
| 2019 | 192 | 158 | 157 |

Pemilih dan Tempat Pemungutan Suara di Pemilu 2024

| Provinsi | Jumlah pemilih | Jumlah TPS |
|----------------------|--------------------|----------------|
| Jawa Barat | 35.714.901 | 140.457 |
| Jawa Timur | 31.402.838 | 120.666 |
| Jawa Tengah | 28.289.413 | 117.299 |
| Sumatera Utara | 10.853.940 | 45.875 |
| Banten | 8.842.646 | 33.324 |
| DKI Jakarta | 8.252.897 | 30.766 |
| Sulawesi Selatan | 6.870.582 | 26.357 |
| Lampung | 6.538.128 | 25.825 |
| Sumatera Selatan | 6.326.348 | 25.985 |
| Riau | 4.732.174 | 19.366 |
| Sumatera Barat | 4.088.606 | 17.569 |
| Nusa Tenggara Timur | 4.008.475 | 16.746 |
| Kalimantan Barat | 3.958.561 | 17.626 |
| Nusa Tenggara Barat | 3.918.291 | 16.243 |
| Aceh | 3.742.037 | 16.046 |
| Bali | 3.269.516 | 12.809 |
| Kalimantan Selatan | 3.025.220 | 13.584 |
| DI Yogyakarta | 2.870.974 | 11.932 |
| Kalimantan Timur | 2.778.844 | 11.441 |
| Jambi | 2.676.107 | 11.160 |
| Sulawesi Tengah | 2.236.703 | 9.462 |
| Sulawesi Utara | 1.969.603 | 8.240 |
| Kalimantan Tengah | 1.935.116 | 7.830 |
| Sulawesi Tenggara | 1.867.931 | 8.154 |
| Kepulauan Riau | 1.500.974 | 5.914 |
| Bengkulu | 1.494.828 | 6.210 |
| Maluku | 1.341.012 | 5.622 |
| Papua Pegunungan | 1.306.414 | 5.850 |
| Papua Tengah | 1.128.844 | 4.484 |
| Kep. Bangka Belitung | 1.067.434 | 4.118 |
| Sulawesi Barat | 985.760 | 4.219 |
| Maluku Utara | 953.978 | 4.192 |
| Gorontalo | 881.206 | 3.539 |
| Papua | 727.835 | 3.109 |
| Kalimantan Utara | 504.252 | 2.295 |
| Papua Barat Daya | 440.826 | 2.156 |
| Papua Barat | 385.465 | 1.923 |
| Papua Selatan | 367.269 | 1.770 |
| Total | 203.056.748 | 820.161 |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, Badan Litbang Kompas/WH

Keramaian tawar-menawar antara penjual dan pembeli di Pasar Senin, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Senin (18/9/2023) pagi, mendadak semakin riuh saat Sura dan Sulu melintasi lorong-lorong lapak para pedagang. Maskot Pemilihan Umum 2024 itu "menggerebek" pasar demi menyebarkan informasi mengenai pemilu serentak yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Sura dan Sulu juga turun ke Pasar Senin demi mengenalkan 18 partai politik yang akan berlaga pada Pemilu 2024.

Dilengkapi sejumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat, Sura dan Sulu membagikan stiker, mug, kipas, dan gantungan kunci kepada para pedagang dan pengunjung Pasar Senin. Bahan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat itu memuat informasi mengenai Pemilu 2024, di antaranya tanggal pemungutan suara, tanda gambar dan nomor urut 18 partai politik (partai) peserta Pemilu 2024, serta pengelompokan daftar pemilih.

"Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 kita akan

melaksanakan pemilu, tentu harapan kami semuanya, Bapak-Ibu hadir karena pemilu ini adalah tanggung jawab kita semua," ujar anggota KPU Pesisir Barat, Zairi Opani, menggunakan pelatung suara saat berkeliling ke lapak-lapak pedagang pasar.

Seusul berkeliling pasar, tim melanjutkan perjalanan ke SMA Negeri 1 Pesisir Selatan untuk menyosialisasikan pemilu kepada siswa kelas XII yang menjadi pemilih pemula di Pemilu 2024. Selanjutnya, rombongan mengarak bendera 18 parpol peserta pemilu di atas mobil bak terbuka mengelilingi pekon-pekon atau rumah-rumah warga di sekitar Kecamatan Pesisir Selatan sambil berorasi soal kepemiluan.

Kunjungan ke pasar tradisional, sekolah, dan rumah warga tersebut merupakan rangkaian kirab pemilu hari keenam di Pesisir Barat. Setelah menerima estafet Kirab Pemilu 2024 dari KPU Kabupaten Kaur, Rabu (13/9), tim KPU Pesisir Barat melanjutkan sosialisasi Pemilu 2024 di daerahnya. Gelaran Kirab Pemilu 2024

menjadi salah satu gebrakan dan inovasi KPU periode 2022-2027 untuk menyosialisasikan pemilu sekaligus sarana pendidikan politik untuk masyarakat pemilih. Sosialisasi melalui kirab ke berbagai pelosok Tanah Air ini disebut baru pertama dilakukan dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Kirab pemilu telah dimulai pada Rabu (14/2) atau tepat setahun sebelum pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024. Menurut rencana, kirab akan berakhiri di Jakarta pada November mendatang.

Ada tujuh rute dengan total 306 kabupaten/kota yang dilalui selama kirab yang berlangsung selama 286 hari tersebut. Kirab berlangsung selama enam hingga tujuh hari di sebuah daerah sebelum dilanjutkan ke kabupaten/kota berikutnya.

Jalur I Provinsi Aceh dimulai dari Banda Aceh akan melewati 44 kabupaten/kota. Kemudian Jalur II Provinsi Kepulauan Riau berawal di Kota Batam, Jalur III Kalimantan dan Jalur IV Provinsi Kalimantan Utara yang dimulai di

Tanjung Selor masing-masing berlangsung selama 43 hari. Adapun Jalur V Kabupaten Kepulauan Morotai yang dimulai di Pulau Morotai akan melewati 44 kabupaten/kota, serta Jalur VII Papua dimulai di Jayapura dan melewati 44 kabupaten/kota.

Kirab pemilu akan mengarak mobil yang berisi 18 bendera parpol nasional berkeliling ke sejumlah tempat, se-

perti perumahan warga, pasar, sekolah, dan lembaga masyarakat. Mobil-mobil tersebut dilengkapi tulisan ajakan untuk mencoblos di tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Khusus untuk Aceh, KPU tak hanya mengenalkan 18 parpol nasional, tetapi juga enam partai lokal.

Bendera parpol peserta pemilu diarak melintasi bukit, melewati lembah, bahkan samudra. Ketika kirab harus berpindah dari satu pulau ke pulau lain, estafet dilakukan di atas kapal laut antarpulau. Di atas kapal, para petugas tetap bekerja mengedukasi para penumpang kapal.

Selain mengarak bendera parpol, kirab di sejumlah daerah juga menampilkan budaya kearifan lokal. KPU setempat turut menggelar pameran, pasar seni, serta parade kesenian dan budaya. Parade biasanya ditampilkan saat estafet dari satu daerah ke daerah selanjutnya. Ini salah satunya dilakukan saat bendera parpol diserahkan dari KPU Bitar ke KPU Kediri, Jawa Timur. Saat itu, bendera parpol diserahkan di atas kapal reog.

"Kirab pemilu yang dilakukan dari daerah ke daerah menjadi simbol bahwa pemilu tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi justru dimulai dan dilaksanakan di daerah," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Pendidikan pemilih

Anggota KPU, August Mellaz, mengatakan, kirab pemilu tidak hanya menjadi sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kirab pemilu yang menampilkan tanda gambar parpol peserta pemilu, jargon kampanye, dan slogan kampanye untuk mengenalkan parpol peserta pemilu. Sebab, parpol juga memiliki keterbatasan untuk menyosialisasikan diri ke seluruh daerah di Indonesia.

Di sisi lain, kirab membutuhkan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan, salah satunya pemerintah daerah. Hal ini mengajut KPU memiliki keterbatasan anggaran untuk menggelar kirab sehingga perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah.

"Kirab pemilu menunjukkan bahwa pemilu tidak bisa dilaksanakan hanya oleh KPU, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan,"

ujar Mellaz.

Lebih jauh, lanjut Mellaz, kirab pemilu menjadi sarana menunjukkan bahwa pemilu bukan hanya peristiwa politik dan ekonomi, melainkan juga peristiwa kebudayaan. Oleh karena itu, pendekatan budaya dipilih karena bisa mawadahi kelompok-kelompok yang tak terlalu familiar hal-hal politik. "Semua kelompok bisa dipersatukan melalui budaya," katanya.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (GPPF) Nurita Dian Paramita mengatakan, sosialisasi yang dimulai dari daerah-daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar merupakan langkah yang baik. Sebab, akses informasi mengenai pemilu di daerah 3T masih relatif terbatas lantaran infrastruktur yang belum memadai.

Namun, menurut Mita, kirab sebaiknya tak sekadar menginformasikan pelaksanaan pemilu, tetapi juga bisa meningkatkan kesadaran kritis pemilih. Dengan demikian, pemilih akan lebih memahami dan menjaga hak-haknya agar tidak dirugikan dalam proses pelaksanaan pemilu. (QIBAL BASTYAN)

Target Meleset, SDGs Bisa Molor 42 Tahun

Jelang Sidang Majelis Umum PBB, dunia diingatkan, 90 persen target SDGs tak akan tercapai pada 2030. Diperlukan 42 tahun lagi untuk mencapainya.

NEW YORK, KOMPAS — Sidang Majelis Umum PBB dimulai, Selasa (19/9/2023), di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Sidang dibuka Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, lalu dilanjutkan dengan pidato para pemimpin, dimulai Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, Presiden AS Joe Biden, dan seterusnya.

"Dunia kita sedang tak stabil. Ketegangan geopolitik meningkat. Tantangan global menghadang. Dan, kita tampak tidak mampu bersama memberikan respons," kata Guterres.

Ia menegaskan, PBB—dan cara negara-negara bekerja sama—harus berubah untuk menjawab tuntutan zaman. "Dunia sudah berubah. Lembaga-lembaga kita belum. Kita tidak bisa efektif mengatasi masalah jika lembaga-lembaga itu tak mencerminkan dunia saat ini," ujar Guterres.

Sehari sebelumnya, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), ia menyoroti agenda Pembangunan Berkelanjutan yang terbengkalai. Salah satu penyebabnya, negara-negara kaya terus beretorika dan melestarikan sistem lama yang tidak adil.

Tidak hanya mengumbar janji pendanaan, contohnya, negara-negara kaya bahkan menghalangi ikhtiar negara berkembang untuk maju, seperti menghambat industrialisasi. Selain Guterres, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyampaikan persoalan tersebut dalam pidatonya. Sejumlah pemimpin dunia lainnya juga menyampaikan perhatian yang lebih kurang sama.

FX LAKSANA AS

LAPORAN DARI AMERIKA SERIKAT



ARSIP KOMPAS

Guterres melaporkan, sampai dengan saat ini, hanya 15 persen dari target SDGs yang sesuai jalur. Sisanya, banyak mengalami kemunduran. Untuk itu, ia mengingatkan, SDGs bukan sekadar daftar target.

SDGs adalah rumusan target dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang diadopsi semua negara anggota PBB pada 2015. Program ini memberikan cetak biru bersama untuk perdamaian serta kemakmuran bagi manusia dan Bumi saat ini serta di masa depan.

KTT SDGs digelar sehari menjelang rangkaian Sidang Majelis Umum ke-78 di New York, 19-26 September 2023. Ini menjadi semacam prakondisi yang akan membangun suasana dan membawa kesadaran bersama para pemimpin pada isu-isu utama pada Sidang Majelis Umum PBB sepekan ini.

Terhadap pencapaian yang minimalis itu, Guterres menekankan, SDGs memerlukan rencana penyelamatan global. "Saya sangat terdorong oleh rancangan deklarasi politik yang rinci dan luas yang sedang dibahas hari ini, terutama komitmen untuk meningkatkan akses negara-negara berkembang terhadap bahan bakar yang diperlukan untuk kemajuan SDG: keuangan," katanya.

Keuangan yang dimaksud Guterres mencakup dukungan yang jelas terhadap stimulus SDGs senilai setidaknya 500 miliar dollar AS per tahun. Ada

pula mekanisme keringanan utang yang efektif yang mendukung penangguhan pembayaran, serta memberikan jangka waktu pinjaman yang lebih panjang dan suku bunga yang lebih rendah. Langkah ini juga butuh desakan agar bank-bank pembangunan multilateralisme mengkapitalisasi ulang dan mengubah model bisnisnya.

Kepentingan Indonesia

Mendapat giliran pidato di urutan tengah pada KTT SDGs, Menlu Retno Marsudi membawa nama ASEAN sekaligus Indonesia. Atas nama kepentingan Indonesia, ia menyatakan, tatanan global saat ini tidak pas dan tak memberikan kesempatan setara kepada negara-negara Selatan. Akibatnya, dunia benar-benar di luar jalur pencapaian target SDGs 2030.

"Tak ada pilihan lain. Dunia harus mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi negara-negara berkembang untuk tumbuh dan membuat lompatan pembangunan. Diskriminasi perdagangan harus dihentikan. Negara berkembang harus diberikan kesempatan untuk melakukan hilirisasi industri," ujar Retno.

Dalam pernyataan bersama atas nama ASEAN, Retno menegaskan, komitmen kuat ASEAN untuk mencapai target SDGs. "Komitmen dan upaya ASEAN untuk mencapai SDGs diselenggarakan dengan Visi ASEAN 2025 dan Visi ASEAN

2045," ujarnya.

Khususnya di tengah situasi global yang tidak menentu seperti sekarang ini, ASEAN akan terus berupaya memperkuat kapasitasnya agar tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan dan guncangan di masa yang akan datang.

Dalam pertemuan dengan wartawan Indonesia sesuai rangkaian acara pada Senin itu, Retno mengelaborasi dan menjelaskan sejumlah hal. Merujuk laporan SDGs yang dirilis PBB, Retno mengatakan, hanya 12 persen target SDGs secara global yang sesuai jalur. Sebanyak 50 persen target kemajuannya lambat dan 30 persen stagnan atau mundur.

Laporan PBB juga menyebutkan, tingkat kelaparan global saat ini adalah yang tertinggi sejak 2005. Terkait kesenjangan jender, diperlukan 286 tahun untuk mengatasinya.

Laporan yang sama menyebutkan, negara berkembang merasakan dampak yang paling parah. Sepertiga negara berkembang mengalami krisis utang. Sementara komitmen bantuan dari negara maju kepada negara berkembang tidak terealisasi.

Ini merujuk pada komitmen bantuan 100 miliar dollar AS per tahun untuk mengatasi perubahan iklim. "Sampai sekarang, komitmen ini juga belum terealisasi," kata Retno.

Menurut SDGs Progress Report 2023 yang dikeluarkan oleh UNESCAP, perkembangan SDGs di Asia Pasifik dan Asia Tenggara baru mencapai 14,4 persen. "Diperkirakan, 90 persen target SDGs tidak akan bisa dicapai pada 2030. Dan, diperlukan 42 tahun lagi untuk mencapai SDGs," kata Retno.

RI stresses Global South economic rights, trade

Retno says lack of progress on global goals rooted in injustice

Yvette Tanamal

The Jakarta Post/New York, United States

With much of its long-term development plan hindered by international trade laws, the current global order has been labeled "unfit" by Indonesian delegates at the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) Summit, who also urged for the end of "discriminatory" trade policies.

These repeated calls from Indonesia came as the country tries to escape from what has been described as the middle-income trap, and amid a bid to enter the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Ahead of the 78th UN General Assembly (UNGA) opening ceremony on Tuesday, global representatives kick-started the week's flurry of meetings at the SDGs Summit, where they deliberated over the sluggish progress in advancing the global sustainable goals that were meant to be achieved by 2030.

UN Secretary-General António Guterres called for a "global rescue plan" on the 17 SDG targets at the summit, as he acknowledged that only about 15 percent were on track to be met and that metrics on some were backtracking.

The 17 SDGs must be achieved by 2030 and include, among other things, inclusive and sustainable economic growth and resilient infrastructure. The UN has warned that the failure to reach the SDG targets before the set date may exacerbate political instability and enable irreversible damage to the environment.

Speaking on behalf of Indonesia, Foreign Minister Retno LP Marsudi said that the SDGs' lackluster progress was rooted in the unjust global order, under which developing countries are being discriminated against.

"We need to put an end to trade discrimination," she said on Monday.

"The Global South must have the opportunities to develop downstream industries."

The trap

Under President Joko "Jokowi" Widodo's administration, Jakarta in recent years has intensified its efforts to elevate its income status, domestically reforming its economic system and diplomatically wooing foreign investors into throwing their hats into the ring of the Indonesian economy.

Although Indonesia in July suc-

cessfully regained upper-middle income status, its annual gross national income (GNI) per capita stands at US\$4,580, on the lower side of the classification, presenting a wide gap between its current economic prowess and the per-capita GNI of the upper-income status, which starts at \$13,845.

Analysts have previously noted that to escape the middle-income trap, Jakarta must innovatively boost research and development.

A major part of Indonesia's plan centers on the downstreaming of its critical mineral industries, starting with the ban of raw nickel exports as part of a scheme to capture the lion's share of the electric vehicle (EV) battery supply chain, as the world moves away from fossil fuels.

The plan has gained traction with various countries, including some African countries that have expressed interest in learning about the downstreaming mechanism, and Australia, which in July agreed to join forces with Indonesia to actualize the plan by supplying Jakarta with large amounts of lithium.

But Indonesia's Western trade partners were not pleased with the scheme, and the European Union filed a lawsuit at the World Trade Organization late last year, to which Jakarta responded with an appeal.

Despite the appeal, Indonesia has not pressed pause on actualizing its plan, with diplomats from the Foreign Ministry insisting that Jakarta does not need permission from its trading partners to develop, also adding that it had received immense support from other developing countries.

"As ASEAN's chair this year, Indonesia [has] set the foundation for ASEAN to be the regional hub for EV and battery manufacturing," Retno said in her speech, "to play [a] bigger role in [the] global supply chain, to foster the green economy and to make Southeast Asia an epicentrum of growth."

Power in numbers

As this year's ASEAN Chair, Retno also spoke on behalf of the Southeast Asian grouping, highlighting the bloc's commitment to engage with its partners to advance the set SDGs, citing some of the outcomes from early September's ASEAN Summit in Jakarta.

Continued on page 11

Continued from page 1

"[ASEAN] recognizes the increasingly challenging and uncertain global environment and agrees to work together to strengthen our resilience," Retno said.

On the sidelines of the UN meetings, Retno held bilateral talks with Palau, Slovakia, the Maldives, Palestine, Timor-Leste, Congo and Kazakhstan. In each of these talks, the minister told reporters, Indonesia and its partners reaffirmed their solidarity as countries of the Global South and discussed collaborations to mitigate climate change.

According to Indonesian diplomats attending the UNGA-related meetings, Indonesia has built strong rapport with Global South countries, an asset that Jakarta will use during talks relating to the UN multilateral reform scheduled for Wednesday.

Expert Habib Abyan Dzak-

wan of the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) said that Indonesia should work on building cooperation among Global South countries, otherwise its rhetoric at the SDGs Summit only serves to promote its own national interests and domestic policies.

Habib said that Malaysia, the Philippines and the Democratic Republic of the Congo had also recognized the need to take advantage of their natural resources with the right technology, but there had not yet been a concerted effort to make the move together.

The 78th UNGA will officially commence on Tuesday under the theme, "Rebuilding trust and reigniting global solidarity: Accelerating action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals towards peace, prosperity, progress and sustainability for all".

—A. MUH. IBNU AQL CONTRIBUTED TO THE STORY FROM JAKARTA

Page: 1 & 11 -
Column: Headlines & General News